

KOMPAS, 5/5/03

## FENOMENA INUL DAN PENDIDIKAN TINGGI

Respons terhadap tulisan W. D. Widodo

Sofian Effendi\*

Gara-gara berdagangdut dengan goyangan ngebornya yang *hot* dan asyik, Inul Daratista menjadi satu-satunya penyanyi dangdut yang masuk dalam *Newsweek* dan *Times*. Jarang orang lain mampu mencapai record seperti itu. Ketika saya membaca tulisan Winarso Dradjat Widodo, Ph.D. di Kompas edisi 1 Mei, saya jadi berfikir, apakah UGM sedang mengalami fenomena Inul? Fikiran ini muncul karena seorang ilmuwan, pemegang gelar *Doctor of Philosophy*, melakukan seperti yang dibuat Oma Irama pada Inul, “menuduh” bahwa UGM dan beberapa PTN telah menyebabkan pendidikan tinggi mahal dan sekaligus amburadul. Tuduhan tersebut sangat tidak beralasan dan mengandung kelemahan logika.

Saya menemukan paling tidak ada 5 *logical fallacies* dalam tulisan tersebut. Pertama, penulis menganggap uniformitas adalah lebih baik dari suatu yang mandiri. Di atas landasan logika tersebut penulis menyimpulkan bahwa sistem penerimaan mahasiswa yang diikuti oleh banyak PT – seperti UMPTN dan SPMB – akan lebih memperbesar peluang para lulusan SLTA untuk diterima di PT. Kita semua tahun bahwa realitasnya bukan demikian, karena ada rayonisasi dalam pelaksanaan ujian masuk bersama semacam itu. Kedua, penulis berargumentasi, dengan silogisme yang keliru, bahwa penerimaan calon mahasiswa akan lebih ditentukan oleh “kesanggupan membayar biaya pendidikan”. Hanya dari membaca Butir Keempat dari pengumuman publik UGM tentang UM-UGM, serta merta penulis menyimpulkan bahwa keputusan UGM akan lebih ditentukan oleh besarnya sumbangan yang dicantumkan oleh calon mahasiswa. Kesimpulan penulis tersebut amat *misleading* dan dapat menebarkan bibit-bibit kecurigaan di masyarakat kita yang oleh Francis Fukuyama dipandang memiliki karakteristik bangsa *low trust*. Dengan alasan ini saja UGM sudah memiliki landsan hukum yang cukup kuat untuk mengajukan somasi kepada seorang penghasut.

Kedua, penulis secara subyektif menyimpulkan bahwa kadar pengetahuan seseorang ditentukan oleh kelulusannya dari SMU. Kalau argumentasi ini diterima, maka logikanya tingkat pengetahuan siswa SMU pada saat menempuh ujian UM-UGM secara signifikan akan berbeda dengan ketika dia menempuh Ujian Akhir Nasional (UAN). Apakah pengetahuan siswa memang berbeda secara signifikan dalam waktu tiga minggu? Mungkin hanya penulis yang dapat menjelaskan logika dari kesimpulannya itu. Instrumen tes yang digunakan dalam UM-UGM dikembangkan dengan sengaja untuk mengatasi kelemahan dari instrument tes yang digunakan Seleksi Masuk Mahasiswa Baru (SPMB) yang hanya mampu mengukur pengetahuan akademik yang dikuasai (*academic achievements*) oleh para pendaftar. Pengukuran *academic achievement* semata-mata tidak menunjukkan potensi akademik dan bakat para calon. Padahal, kami menginginkan, atas dasar pemahaman para ahli psikologi kami, penerimaan calon mahasiswa tidak hanya

---

\* Sofian Effendi, Guru Besar Universitas Gadjah Mada.

didasarkan semata-mata pada ukuran pengetahuan yang dikuasainya, tetapi juga atas dasar potensi akademik, bakat serta aspek-aspek non-kognitif lainnya. Memang kami sadar betul bahwa dalam seleksi massal dan tertulis, sukar diperoleh informasi yang sah mengenai aspek non-kognitif tersebut. Tetapi kan lebih baik daripada keputusan untuk menerima atau menolak calon hanya didasarkan atas kriteria yang tidak lengkap, apalagi tidak akurat?

Ketiga, lebih membingungkan lagi argumentasi penulis ketika dia serta merta mengaitkan sistem seleksi UM-UGM ini dengan biaya pendidikan yang berlaku di UGM. Sistem seleksi dan biaya pendidikan adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya memang menjamin terlaksananya pendidikan tinggi yang berkualitas. Dengan sistem seleksi yang lebih baik diharapkan akan dapat terjaring calon mahasiswa yang lebih berkualitas. Dengan tersedianya dana, dapat ditingkatkan kualitas proses pembelajaran di UGM sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari PT luar negeri.

Sekedar informasi, menurut kalkulasi yang dilakukan oleh fakultas-fakultas di lingkungan UGM, pada tahun 2003 biaya pendidikan rata-rata adalah Rp. 11 juta per mahasiswa per tahun. Biaya pendidikan ini tidak mungkin dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa. Pada Tahun Akademik 2003, rata-rata SPP dan BOP yang dibebankan pada mahasiswa adalah antara Rp. 0,5 – 0,75 juta per semester atau antara Rp. 1 – 1,5 juta per tahun, Selisihnya disubsidi oleh pemerintah dan universitas, sebesar 85 sampai 90 persen, tergantung fakultasnya. Subsidi tersebut diberikan kepada semua mahasiswa tanpa memandang kemampuan ekonomi orang tua, padahal, 70 persen mahasiswa UGM berasal dari keluarga mampu.

Kalau dibandingkan dengan biaya di perguruan tinggi yang lebih maju, memang biaya pendidikan tinggi di negara kita relatif rendah. Kalau biaya pendidikan di UGM diberi indeks 1, misalnya, di Universitas Malaysia indeks biaya pendidikan adalah 14, di Universitas Nagoya, 19, di Universitas AMIS, Arab Saudi, sudah mencapai 29, dan di *state universities* di Amerika mencapai 20-21. Perbedaannya begitu besar karena gaji dosen di PT Indonesia hanya 1/20 gaji dosen di negara jiran. Universitas di sana pun dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan, fasilitas penelitian dan layanan telekomunikasi dan interkoneksi jaringan internet yang amat baik. Semua fasilitas yang baik itu memerlukan biaya yang besar. Karena gaji yang amat rendah, sebagian besar dosen di PTN hanya bekerja satu dua hari di kampusnya dan sisanya pergi ke mana-mana mencari tambahan pendapatan dengan menelantarkan tugas dan kewajibannya di kampus. Fasilitas pun hanya tersedia sekadarnya sehingga tidak mampu mendukung kegiatan akademik berkualitas tinggi.

Keempat, sebagai dosen IPB yang pernah menuntut ilmu di Negara Sakura, penulis tentu faham sekali bahwa pendidikan tinggi berkualitas memerlukan biaya yang amat besar. Jadi pasti mahal. Di negara yang berkemampuan ekonomi tinggi, Pemerintah lah yang menanggung sebagian besar biaya pendidikan. Mahasiswa biasanya hanya menanggung 25-30 persen dari biaya pendidikan. Di negara kita, kontribusi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan hampir mencapai 20 persen, tetapi jangan lupa, biaya pendidikan

kita adalah 1/14 dari biaya di negara tetangga. Ini lah salah satu sebab utama rendahnya kualitas akademik di PT kita.

Sebelum penulis menyimpulkan dan menyebarkan isu atas dasar informasi yang salah kepada masyarakat, cobalah bandingkan biaya pendidikan di beberapa lembaga pendidikan menengah atas dan PT. Apa biaya pendidikan yang dibebankan oleh UGM memang *outrageous*? Jangan-jangan di IPB biayanya lebih tinggi. Lebih tidak proporsional cara penulis membentuk opini public dengan menghubungkan diskusi tentang biaya pendidikan di UGM dengan dua artikel yang dimuat di Kompas edisi 23 April. Kedua artikel tersebut membicarakan masalah berbeda yang tidak terkait sama sekali dengan masalah pembiayaan pendidikan apalagi pendidikan tinggi. Sebagai seorang ilmuwan seharusnya bung Winarso lebih teliti lah menggunakan referensi. Jangan melakukan disinformasi kepada publik apalagi dengan tujuan sekedar mencari popularitas.

Kelima, sebagai Ketua Komisi Pendidikan di lembaga pendidikan tinggi yang terhormat mestinya penulis lebih teliti dalam menyampaikan informasi dan kalkulus pendidikannya kepada publik. Entah apa motifnya, penulis dengan kadar subyektivitas yang tinggi membuat konklusi yang menyesatkan publik. Hanya dengan berandai-andai, penulis menyimpulkan bahwa PTN yang menyelenggarakan seleksi masuk secara mandiri dapat memperoleh keuntungan sekitar 60 persen dari biaya seleksi masuk yang dipungutnya. Dari mana penulis sampai pada kesimpulan tersebut, wallahualam. Padahal dalam kenyataannya UGM dapat menyelenggarakan UM di 16 propinsi hanya karena dukungan finansial dari para alumninya yang peduli. Kenyataannya, penyelenggaraan SPMB dengan biaya pendaftaran lebih tinggi selama bertahun-tahun hanya sanggup mencapai titik impas.

Akhirnya, sebagai sesama warga kampus yang tahu sopan santun dan kode etik penulisan, saya hanya mendoakan semoga bung Winarso selalu memiliki kejernihan berfikir, lebih cerdas analisisnya dan lebih konstruktif usulannya. Hanya dengan cara demikian kita dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan pendidikan tinggi. Selamat merayakan Hardiknas.

Yogyakarta, 2 Mei 2003